

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

---

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2015 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Marco Budi Gunawan Sinaga<sup>1</sup>

Yovinus<sup>2</sup>

Danny Permana<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of the West Java Provincial Government's policy on the Program for the Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RUTILAHU) as stipulated in Governor Regulation No. 46 of 2015 in Purwakarta Regency. Using George C. Edward III's implementation theory, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, this research employs a qualitative descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with government officials, community leaders, and program beneficiaries, as well as field observations and document reviews. The findings show that the implementation of the RUTILAHU program in Purwakarta generally runs effectively but is constrained by limited budget allocation and coordination among stakeholders. The communication dimension demonstrates that socialization and information flow have improved community understanding of the program. Resource-wise, human and financial constraints remain key obstacles. The disposition of implementers reflects a strong commitment to community welfare, while bureaucratic structures tend to be rigid and slow in administrative processes. This study concludes that policy implementation requires strengthened inter-organizational coordination and adaptive mechanisms to achieve sustainability.*

***Keywords: policy implementation, housing rehabilitation, West Java Province, public policy, community welfare***

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan mendasar dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi seperti Kabupaten Purwakarta. Kebutuhan akan hunian layak semakin meningkat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

seiring pertumbuhan penduduk dan tekanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta (2024), terdapat lebih dari 4.200 unit rumah yang dikategorikan tidak layak huni. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi rumah melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan Program RUTILAHU melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015, yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin dengan prinsip gotong royong, pemberdayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Program ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan salah satu misi pembangunan Jawa Barat yaitu “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan”.

Namun, implementasi kebijakan di tingkat kabupaten seringkali menghadapi tantangan kompleks. Di Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan program RUTILAHU memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat (Pokmas), serta penerima manfaat. Keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, dan komunikasi yang belum optimal sering kali menyebabkan pelaksanaan program tidak mencapai target tahunan secara maksimal.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini menjadi kerangka utama dalam menganalisis pelaksanaan Program RUTILAHU di Purwakarta.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: Bagaimana implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 di Kabupaten Purwakarta? Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan empat dimensi teori Edward III, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan efektivitas program perumahan rakyat yang berbasis kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

#### *Kerangka Teori*

Setiap kebijakan publik pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah dalam mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan pembangunan yang diinginkan. Namun, kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak serta merta menghasilkan hasil yang optimal jika implementasinya tidak berjalan efektif. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses strategis yang menjembatani antara rancangan kebijakan (policy formulation) dan hasil akhir (policy outcome). Implementasi merupakan tahapan di mana keputusan politik diterjemahkan ke dalam tindakan administratif, sosial, dan teknis di lapangan (Kapioru, 2014).

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Kapioru (2014:105). Menurut Kapioru, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat dimensi utama, yaitu kondisi lingkungan (environmental conditions), hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship), sumber daya (resources), dan karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies). Keempat dimensi ini tidak hanya bersifat saling melengkapi, tetapi juga saling memengaruhi secara dinamis dalam praktik kebijakan publik di lapangan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Pertama, kondisi lingkungan (environmental conditions) mencakup faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya lokal, stabilitas politik, dan dukungan publik terhadap kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat efektivitas implementasi, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksanaan program.

Kedua, hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship) menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga pelaksana kebijakan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun antar lembaga teknis. Hubungan yang harmonis antar organisasi memungkinkan distribusi tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, serta penyelesaian masalah yang lebih cepat di lapangan. Dalam konteks kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting untuk mencapai keberhasilan program.

Ketiga, sumber daya (resources) meliputi kapasitas manusia, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan akan sulit diwujudkan secara optimal, meskipun perencanaan sudah matang. Sumber daya yang memadai menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program.

Keempat, karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies) berkaitan dengan struktur organisasi, budaya birokrasi, pola kepemimpinan, serta tingkat profesionalisme pelaksana kebijakan. Institusi pelaksana yang memiliki kultur kerja adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik akan cenderung menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, teori Kapioru memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat aspek teknokratis dari implementasi, tetapi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

juga memperhatikan dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Purwakarta, guna mengetahui sejauh mana keempat dimensi tersebut berperan dalam menentukan efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana di tingkat lokal.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian kebijakan publik, metode penelitian berperan penting untuk menjelaskan hubungan antara konsep teoretis dengan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Program RUTILAHU di Kabupaten Purwakarta.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengukur efektivitas kebijakan secara kuantitatif, tetapi juga menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pelaksana serta penerima manfaat dalam konteks sosial mereka. Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan ini efektif untuk menjelaskan fenomena kompleks seperti interaksi antar lembaga, perilaku birokrasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan publik.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Kecamatan Plered dan Darangdan yang menjadi wilayah prioritas penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan yang tinggi, jumlah penerima program yang signifikan, dan variasi dalam pelaksanaan kebijakan antar wilayah.

Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, camat, kepala desa, ketua kelompok masyarakat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

(Pokmas), serta masyarakat penerima manfaat program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap laporan kegiatan serta peraturan daerah terkait implementasi Program RUTILAHU.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami implementasi kebijakan secara menyeluruh berdasarkan empat dimensi teori Kapioru, dengan menekankan hubungan antara kebijakan, lingkungan sosial, struktur kelembagaan, dan peran sumber daya. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan pelaksanaan program secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Purwakarta.

## **PEMBAHASAN**

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi namun masih menghadapi tantangan sosial yang cukup serius, terutama terkait dengan kondisi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta (2024), masih terdapat sekitar 4.200 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebagai bagian dari kebijakan pembangunan perumahan yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015.

Pelaksanaan Program RUTILAHU di Kabupaten Purwakarta bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan sarana tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Program ini mengedepankan prinsip gotong royong dan pemberdayaan masyarakat, di mana kelompok masyarakat (Pokmas) ditunjuk sebagai pelaksana teknis rehabilitasi dengan pengawasan dari Dinas Perumahan dan pemerintah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Plered dan Kecamatan Darangdan, dua wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program menunjukkan hasil yang cukup positif, namun masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta keterbatasan kelembagaan. Analisis berikut menguraikan bagaimana keempat dimensi teori Kapioru (2014) yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter institusi implementor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut..

### *1. Kondisi Lingkungan*

Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Program RUTILAHU. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkim dan para kepala desa di lokasi penelitian, mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Kondisi ini menjadikan partisipasi mereka dalam tahapan administrasi dan pelaporan program masih terbatas, meskipun semangat gotong royong di lapangan sangat kuat.

Secara sosial, masyarakat Purwakarta memiliki tradisi gotong royong yang masih melekat. Nilai ini menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan program. Banyak kegiatan pembangunan rumah yang dilakukan secara kolektif, di mana warga sekitar membantu proses pengerjaan rumah tanpa imbalan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan sosial sangat mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Namun demikian, kondisi geografis di beberapa wilayah seperti Darangdan dan Cibatu yang berbukit menjadi kendala dalam transportasi material dan pengawasan teknis pembangunan. Selain itu, faktor ekonomi juga

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

menjadi penentu. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat menyebabkan mereka kesulitan melakukan swadaya tambahan jika biaya rehabilitasi melebihi anggaran bantuan yang ditetapkan pemerintah.

Secara umum, kondisi lingkungan di Kabupaten Purwakarta dapat dikategorikan kondusif secara sosial, tetapi masih menghadapi tantangan ekonomi dan geografis. Implementasi program membutuhkan strategi adaptif agar setiap tahapan pelaksanaan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kapasitas masyarakat.

## *2. Dimensi Hubungan Antar Organisasi*

Koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan publik, terutama untuk program lintas sektor seperti RUTILAHU. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antar organisasi pelaksana di Kabupaten Purwakarta melibatkan tiga aktor utama, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penyedia anggaran dan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perkim sebagai pelaksana teknis dan pengawas, serta Pemerintah Desa dan Pokmas sebagai pelaksana kegiatan di tingkat lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi berjalan relatif baik melalui forum rapat koordinasi tahunan dan pelaporan kegiatan. Namun, hubungan antara Dinas Perkim dan Pokmas di tingkat desa belum sepenuhnya efektif. Sebagian Pokmas mengeluhkan keterlambatan dalam pencairan dana dan kurangnya kejelasan prosedur administrasi. Di sisi lain, Dinas Perkim menilai masih banyak Pokmas yang belum memahami tata cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

Dalam perspektif teori Kapioru, hubungan antar organisasi yang belum optimal ini menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Meskipun demikian, adanya mekanisme komunikasi terbuka antara instansi terkait melalui *grup koordinasi daring* dan kunjungan lapangan rutin memperlihatkan adanya kemajuan dibandingkan periode sebelumnya. Koordinasi horizontal antar desa dan lintas kecamatan juga mulai terbentuk melalui forum bersama yang difasilitasi oleh Dinas Perkim.

Dengan demikian, hubungan antar organisasi di Purwakarta dapat dikatakan cukup sinergis namun masih memerlukan penguatan pada aspek kejelasan peran, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kapasitas organisasi pelaksana di tingkat lokal.

### 3. *Dimensi Sumber Daya*

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Program RUTILAHU, sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta waktu pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala yang cukup signifikan di Kabupaten Purwakarta.

Dari sisi anggaran, bantuan yang diberikan sebesar Rp20 juta per rumah dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk membangun rumah yang benar-benar layak. Dalam banyak kasus, masyarakat penerima manfaat harus menambah biaya pribadi atau bergotong royong dengan warga sekitar agar pembangunan dapat selesai sesuai standar teknis. Pemerintah desa sering kali membantu melalui dukungan material atau tenaga kerja sukarela untuk mengatasi keterbatasan dana tersebut.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, petugas teknis dari Dinas Perkim yang bertugas melakukan verifikasi dan pengawasan jumlahnya sangat terbatas dibandingkan luas wilayah sasaran. Hal ini menyebabkan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara intensif. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Dinas Perkim melibatkan aparat desa dan kepala dusun sebagai pengawas tambahan di tingkat lokal.

Kendati sumber daya terbatas, kreativitas dan semangat sosial masyarakat menjadi kekuatan pengimbang. Pola kolaboratif yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat berhasil menjaga efektivitas pelaksanaan program. Namun untuk keberlanjutan, peningkatan kapasitas teknis pelaksana dan dukungan anggaran yang lebih fleksibel masih sangat diperlukan.

#### *4. Dimensi Karakteristik Institusi Implementator*

Karakteristik institusi pelaksana kebijakan menggambarkan pola organisasi, budaya kerja, dan tingkat profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perkim Kabupaten Purwakarta memiliki struktur birokrasi yang cukup tertata, namun masih bersifat hierarkis. Proses administrasi dari perencanaan hingga pelaporan memerlukan waktu panjang karena harus melewati berbagai tahapan verifikasi antar level pemerintahan.

Dari sisi kepemimpinan, Kepala Dinas dan para pejabat di tingkat bidang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan program. Mereka aktif turun ke lapangan untuk memantau progres dan memberikan arahan langsung kepada Pokmas. Namun demikian, beban administrasi yang berat dan keterbatasan staf menyebabkan beberapa kegiatan monitoring tidak berjalan secara simultan di seluruh kecamatan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Selain itu, kultur organisasi di tingkat desa juga memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa kepala desa memiliki gaya kepemimpinan partisipatif yang mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi, sementara di desa lain masih terdapat kecenderungan birokratis dan ketergantungan pada arahan dari kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh karakter institusi pelaksana di berbagai level pemerintahan.

Secara umum, institusi pelaksana di Kabupaten Purwakarta telah menunjukkan kemajuan menuju model birokrasi kolaboratif. Namun, masih dibutuhkan reformasi administratif dan sistem evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Kapioru (2014), dapat disimpulkan bahwa implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Purwakarta berjalan cukup efektif, terutama karena dukungan lingkungan sosial yang kuat dan meningkatnya koordinasi antar lembaga. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi masih menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara struktur kelembagaan yang efisien dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan memperkuat sinergi antar organisasi dan memperluas kapasitas sumber daya, efektivitas program dapat ditingkatkan menuju keberlanjutan jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan *Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)* berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015** di Kabupaten Purwakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program menunjukkan bahwa dimensi lingkungan sosial masyarakat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

berperan besar dalam mendukung keberhasilan kegiatan rehabilitasi rumah, terutama melalui nilai gotong royong dan partisipasi lokal yang masih kuat di berbagai desa. Kondisi sosial yang kondusif serta kepedulian masyarakat terhadap sesama menjadi modal sosial penting dalam memperlancar pelaksanaan program.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa koordinasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan, tetapi masih belum optimal. Hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu terus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan informasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan teknis maupun administratif. Sumber daya yang terbatas, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga teknis, masih menjadi tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Meski demikian, semangat kolaboratif dari aparat pelaksana dan kelompok masyarakat mampu menjadi kompensasi terhadap keterbatasan tersebut.

Karakter institusi pelaksana menunjukkan adanya komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program, meskipun masih dihadapkan pada sistem birokrasi yang panjang dan hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif agar proses pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor lingkungan, sinergi kelembagaan, dukungan sumber daya, dan efektivitas struktur organisasi pelaksana.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program RUTILAHU di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga melalui sistem komunikasi yang lebih terbuka dan digitalisasi administrasi program. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi aparat Dinas

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

Perkim maupun kelompok masyarakat pelaksana (Pokmas), melalui pelatihan teknis dan manajemen keuangan agar pelaksanaan program lebih transparan dan akuntabel.

Dari sisi pendanaan, pemerintah perlu meninjau kembali besaran bantuan yang diberikan agar lebih realistis terhadap kebutuhan konstruksi dan harga material di lapangan. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga sosial untuk memperluas dukungan pembiayaan dan mempercepat capaian target rehabilitasi rumah tidak layak huni. Terakhir, dalam jangka panjang, dibutuhkan kebijakan yang lebih integratif yang menghubungkan program perumahan dengan sektor kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penataan ruang agar hasil rehabilitasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Adiyanto, Y., & Purbasari, R. (2021). Collaborative governance dalam implementasi kebijakan perumahan rakyat di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 125–140. <https://doi.org/10.23960/japi.v11i2.2021>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathurrahman, M., & Fitriani, R. (2022). Evaluasi program perumahan rakyat berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 56–70. <https://doi.org/10.47191/jipp.v9i1.2022>
- Kapioru, M. (2014). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di era kolaboratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

- 
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, T., & Hidayat, R. (2023). Faktor lingkungan sosial dalam efektivitas implementasi kebijakan perumahan layak huni di daerah perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 245–260. <https://doi.org/10.31293/jakp.v12i3.2023>
- Suharto, E. (2022). Good governance and local housing policy: Lessons from Indonesia. *Asian Journal of Public Policy*, 14(2), 187–204. <https://doi.org/10.1080/17516234.2022.2094873>
- Syafitri, D., & Kurniawan, F. (2023). Optimalisasi sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 33–48. <https://doi.org/10.31293/jkmp.v11i1.2023>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Wibowo, H., & Setiawan, I. (2024). Strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.52306/jpd.v10i1.2024>